

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa yang merdeka bukanlah bangsa yang hanya telah memproklamkan kemerdekaannya kepada bangsa lain, akan tetapi suatu bangsa dikatakan merdeka ketika seluruh rakyatnya bebas melakukan ekspresi dalam segala sektor tanpa ada tekanan dari pihak lain. Dalam merebut kembali kemerdekaan Indonesia dari genggaman penjajahan bangsa asing, Indonesia telah melewati perjalanan panjang untuk sampai pada gerbang kemerdekaan yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta.

Sejarah bangsa Indonesia merupakan sejarah perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing. Datangnya bangsa Portugis dan Belanda telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kesengsaraan dan penderitaan rakyat semakin diperparah dengan datangnya bangsa Jepang ke Indonesia.

Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dengan dalih melakukan perdagangan berhasil menguasai perdagangan di Malaka pada tahun 1511. Sejarah mencatat bahwa pusat perdagangan Asia berada di Malaka.<sup>1</sup> Setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka, Portugis kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dengan mendatangi Maluku. Pada tahun 1512 Portugis berhasil menguasai Maluku dan memonopoli seluruh perdagangan rempah-rempah yang berada di Maluku tersebut. Sebagai konsekuensi dari monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Portugis,

---

<sup>1</sup> <http://rinanditya.webs.com/masuknyabgsasing.htm> di akses pada tanggal 26 Desember 2010

maka seluruh perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku hanya boleh dilakukan oleh Portugis. Setelah menyadari bahwa monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Portugis merugikan para pedagang pribumi yang berada di Maluku maka Maluku menolak kedatangan Portugis untuk selanjutnya. Puncak penolakan tersebut terjadi ketika raja Harun (Raja Tidore) terbunuh oleh Portugis sehingga pada tahun 1578 Portugis diusir dari Maluku.<sup>2</sup> Setelah itu, Portugis kemudian mencari tempat lain yaitu di Sumatera dan Pulau Jawa. Di Sumatera, Portugis berusaha menguasai cengkeh dan lada akan tetapi usaha tersebut kurang berhasil karena Aceh sangat kuat dalam perdagangan lada. Sejarah mencatat kemudian bahwa keberadaan Portugis di Indonesia diawali pada tahun 1511 hingga tahun 1641.<sup>3</sup>

Selain penjajahan yang dilakukan oleh Portugis, penjajahan juga dilakukan oleh Belanda. Dibawah pimpinan Cornelis de Houtman Belanda tiba di Banten pada tahun 1596.<sup>4</sup> Setelah tiba di Banten, Belanda kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Maluku. Sejak berdirinya VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) pada tahun 1602, Belanda diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial diwilayah tersebut oleh Parlemen Belanda. Dan sejak itu pula, Belanda merupakan penguasa tunggal di Maluku. Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kepala Operasional VOC, perdagangan cengkeh di Maluku sepenuh di bawah kendali VOC.<sup>5</sup> Dalam usaha untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://hasheem.wordpress.com/2009/04/02/latar-belakang-masuknya-bangsa-eropa-keindonesia/> diakses pada tanggal 26 Desember 2010

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia) diakses pada tanggal 26 Desember 2010

terlibat dalam politik dan melakukan perpecahan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram dan Banten.<sup>6</sup>

Pada akhir abad ke- 18, VOC mengalami kemunduran yang disebabkan oleh gencarnya persaingan dari bangsa Portugis dan Inggris, korupsi dan pencurian yang dilakukan para pegawai VOC, maraknya perdagangan gelap dijalur monopoli VOC, dan besarnya anggaran belanja VOC yang tidak sebanding dengan pemasukannya menyebabkan VOC dibubarkan pada tahun 1799 dengan segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda dengan tujuan agar wilayah Indonesia tetap dalam wilayah pengendalian Belanda.<sup>7</sup>

Setelah VOC diambil alih oleh Belanda, maka Raja Louis Napoleon Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Herman Willem Daendels berkuasa pada tahun 1808 hingga tahun 1811. Selama berkuasa, Daendels mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya dalam bidang pertahanan, ia bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang saat itu sedang berperang melawan Prancis, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang Indonesia, membangun benteng-benteng militer, pabrik senjata, dan rumah sakit militer, membangun jalan utama yang menghubungkan kota-kota sepanjang pantai utara Pulau Jawa, pembangunan pelabuhan di Banten, Merak, dan Surabaya serta membuat perahu-perahu untuk keperluan pemerintahannya, dan menjual tanah rakyat kepada pengusaha asing dari Belanda, Arab dan Cina.<sup>8</sup> Seluruh kebijakan tersebut dilakukan dengan system kerja paksa yang disebut kerja rodi.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> <http://rinanditya.webs.com/masuknyabgsasing.htm>

<sup>8</sup> *Ibid.*

Rakyat harus bekerja keras membangun sarana umum tersebut tanpa mendapat upah. Ribuan rakyat meninggal saat mengerjakan pembuatan jalan raya tersebut. Tindakan tersebut menimbulkan konflik dengan para penguasa lokal dan membuat raja Lois Napoleon Banaparte menarik kembali Daendels ke Belanda.

Kemudian pada tahun 1830-1870 kekuasaan Belanda yang berada di Indonesia berada dibawah kekuasaan Van den Bosh. Van den Bosh mulai menerapkan kebijakan dengan adanya sistem tanam paksa (*Cultuur Stelsel*). Setiap petani di Jawa wajib menanam tanaman perdagangan ekspor yang laku dipasaran Eropa/dunia. Jenis tanaman tersebut adalah gula, nila (*indigo*), teh, tembakau, kayu manis, kapas, kopi, lada, karet, dan kelapa sawit. Dengan diberlakukannya sistem tanam paksa ini, pemerintah Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar sehingga hutang-hutang Belanda dapat dilunasi bahkan semua masalah keuangan Belanda dapat teratasi.<sup>9</sup>

Sistem tanam paksa ini sangatlah membebani rakyat Indonesia karena seluruh hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Belanda. Selain itu, sistem tanam paksa juga menimbulkan bahaya kepalaran yang menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Setelah keadaan tersebut diketahui oleh orang-orang Belanda yang ada di Belanda, sistem tanam paksa tersebut ditentang dan dihapuskan pada tahun 1870.<sup>10</sup>

Sebagai bentuk kritik terhadap politik tanam paksa maka pada tahun 1901 Belanda mencrapkan politik etis (*Ethische Politiek*) atau politik balas budi. Belanda Politik etis dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah Belanda

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia)

terhadap kesejahteraan pribumi. Politik etis tersebut dipelopori oleh Pieter Brooshooft seorang wartawan koran *De Locomotief* dan C.Th. van Deventer seorang politikus Belanda.<sup>11</sup> Menurut van Deventer, Belanda mempunyai hutang budi terhadap rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia telah meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan oleh van Deventer mencakup tiga hal yang kemudian disebut dengan trilogi van Deventer. Isi dari trilogi van Deventer tersebut adalah pertama adalah irigasi (pengairan), yaitu usaha membangun irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk. Kedua adalah edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia lebih baik. Dan yang ketiga adalah migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan yang padat penduduknya (khususnya Pulau Jawa) ke daerah lain yang jarang penduduknya agar merata.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan trilogi van Deventer, pegawai-pegawai Belanda melakukan penyelewengan terhadap trilogi tersebut. Dalam hal irigasi, pegawai Belanda hanya melakukan irigasi kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda sementara milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Dalam hal edukasi, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah dan pendidikannya ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Sementara, dalam bidang imigrasi, Belanda

---

<sup>11</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_Etis](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Etis) diakses pada tanggal 27 Desember 2010

<sup>12</sup> <http://www.g-excess.com/id/kebijakan-pemerintah-hindia-belanda-politik-etis.html> diakses pada tanggal 27 Desember 2010

melakukan imigrasi kedaerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah perkebunan-perkebunan milik Belanda.<sup>13</sup>

Penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan Belanda dalam menerapkan politik etis menimbulkan perlawanan terhadap rakyat Indonesia. Perlawanan tersebut kemudian melahirkan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Politik etis tidak hanya membuat rakyat Indonesia sengsara, namun politik etis juga menciptakan jurang pemisah dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari diterapkannya sistem pendidikan oleh pemerintah Belanda, kesadaran nasional muncul pada abad ke- 20. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintahan Belanda menciptakan kelompok-kelompok terpelajar dan menjadi motor penggerak nasionalisme Indonesia. Melalui kelompok terpelajar tersebut perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialism barat memasuki babak baru. Perjuangan tidak lagi dilakukan dengan perlawanan bersenjata, tetapi dengan menggunakan organisasi modern. Ide-ide yang muncul pada masa pergerakan nasional hanya terbatas pada para bangsawan terdidik saja. Selain mereka mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, mereka jugalah yang mampu mengikuti pola pikir pemerintah Belanda. Mereka menyadari bahwa pemerintah Belanda yang memiliki organisasi yang rapi dan kuat tidak mungkin dihadapi dengan cara tradisional seperti perlawanan rakyat sebelumnya.

Dengan demikian, dapat dilihat beberapa organisasi yang lahir pada masa pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Mas Ngabehi Sudirohusodo dengan Soetomo. Kemudian, lahir

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

pula Serikat Islam yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam pada akhir tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Serikat dagang Islam berganti nama menjadi Serikat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Haji Oemar Said Cokroaminoto (H.O.S Cokroaminoto). Setelah itu, pada tanggal 25 Desember 1912 lahir pula Indische Partij yang didirikan di Bandung dan didirikan oleh Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudhi), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Perhimpunan Indonesia lahir pada tahun 1908 dan didirikan oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda antara lain Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda, antara lain Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Lalu ada, Partai Komunis Indonesia yang merupakan benih-benih paham Marxisme ditanamkan di Indonesia oleh H.J.F.M Sneevliet seorang pemimpin buruh Belanda. Dan Partai Nasional Indonesia (PNI) dibentuk di Bandung 4 Juli 1927 dengan tokoh-tokohnya Ir. Soekarno, Iskaq, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Tilaar Soedjadi, dan Sunaryo. PNI diketuai oleh Ir. Soekarno.<sup>14</sup>

Lahirnya nasionalisme Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal yaitu seluruh nusantara telah menjadi satuan politik, hukum, pemerintahan, dan berada dibawah kekuasaan Belanda. Ironisnya, eksploitasi Barat justru mampu menyatukan rakyat menjadi senasib sepenenderitaan. Selain itu, munculnya kelompok intelektual sebagai dampak sistem pendidikan Barat. Kelompok inilah yang mampu mempelajari beragam konsep Barat untuk dijadikan ideologi dan dasar dalam gerakan melawan kolonialisme Barat. Dan beberapa tokoh pergerakan mampu memanfaatkan kenangan

---

<sup>14</sup> <http://id.shvoong.com/humanities/history/2089519-kelahiran-dan-bangkitnya-nasionalisme-indonesia/> diakses pada tanggal 27 Desember 2010

kejayaan masa lalu (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram) untuk dijadikan motivasi dalam bergerak dan meningkatkan rasa percaya diri rakyat dalam berjuang menghadapi kolonialisme Barat.<sup>15</sup>

Ditengah-tengah pergolakan bangsa melawan Belanda, terjadi Perang Dunia II pada bulan Mei 1940.<sup>16</sup> Perang Dunia II secara tidak langsung berpengaruh terhadap politik dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942 tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan berhasil mengusir Belanda dari Indonesia dengan tanpa syarat. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh penjajahan Jepang. Kemenangan gemilang yang diperoleh tentara Jepang dalam waktu yang sangat singkat memang menakjubkan, dan menimbulkan kepercayaan orang terhadap keunggulan dan kemampuan tentara Jepang. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan bala tentara dalam mengusir kaum imperialisme Barat yang selama berabad-abad bercokol di berbagai Negara di Asia dan membebaskan rakyat jajahan dari belenggu kaum imperialisme telah meningkatkan martabat Jepang pada taraf yang sangat tinggi.

Kedatangan Jepang ke Indonesia yang seakan membawa angin segar terhadap perubahan nasib rakyat Indonesia. Dengan merebut simpati rakyat Indonesia, Jepang seakan-akan menjadi pembebas bagi bangsa Indonesia. Setelah Jepang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia dan setelah semangat bangsa Indonesia yang meluap-luap itu mulai reda, Jepang mulai menambah jumlah tentara Dai Nippon masuk ke Indonesia. Setelah itu, Jepang mulai mengatur pemerintahan dan menyalurkan semangat rakyat Indonesia kearah kepentingan bala tentara pendudukan Jepang. Pengibaran bendera merah putih dan nyanyian lagu Indonesia Raya mulai dilarang

---

<sup>15</sup> <http://gurumuda.com/bse/lahirnya-nasionalisme-indonesia> diakses pada tanggal 27 Desember 2010

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia)

dan diganti dengan pengibaran bendera Jepang *Hi No Manu*.<sup>17</sup> Tindakan selanjutnya adalah melakukan penyegelan terhadap radio-radio agar rakyat Indonesia tidak dapat mendengarkan siaran dari sekutu, dan hanya mendengarkan siaran berita resmi dari pemerintahan militer Jepang. Surat kabar dilarang terbit, menunggu penerbitan pemerintah. Mulut dan telinga seolah disumbat.

Dalam bidang politik, tindakan pertama kali yang dilakukan pihak Jepang adalah pembekuan segala kegiatan politik. Semua pergerakan rakyat yang berhaluan politik dilarang. Pemerintahan militer Jepang menerapkan sistem fasisme dan menetapkan garis politik pemerintah sebagai satu-satunya aliran yang harus ditaati. Pihak Jepang percaya di Asia telah terbit cahaya yang menyilaukan dan cahaya itu adalah Jepang. Bala tentara Jepang kemudian melancarkan Gerakan Tiga A sebagai doktrin politik penjajahannya, yaitu *Nippon Cahaya Asia*, *Nippon Pelindung Asia*, dan *Nippon Pelindung Asia*. Di Indonesia, Gerakan Tiga A dipimpin oleh Mr. Sjamsuddin. Gerakan ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh bala tentara Jepang karena Mr. Sjamsuddin belum mendapat kepercayaan rakyat dan tidak mampu mengikat hati rakyat Indonesia. Gerakan Tiga A kemudian dibubarkan pada bulan November 1942. Pada permulaan Maret 1943, bala tentara Jepang mengumumkan berdirinya badan baru dibawah pimpinan tokoh-tokoh nasional yang telah mendapat kepercayaan dari rakyat. Badan baru itu adalah "*Putera*", singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu, Soekarno, Hatta, Ki hadjar Dewantara, dan K.H Mas Mansur.<sup>18</sup> Bagi Jepang, didirikannya

---

<sup>17</sup> Slamet Muljana. *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid II*. Yogyakarta. Lkis. 2008. Hal. 7

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 8

Putera ditujukan untuk menyelenggarakan “Asia Timur Raya” dibawah pimpinan Jepang dan mengerahkan tenaga rakyat untuk kepentingan perang demi kemenangan pihak Jepang. Sedangkan bagi tokoh nasional, berdirinya Putera ditujukan untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialis Belanda. Berdirinya Putera kemudian lebih bagi rakyat Indonesia daripada Jepang karena dengan Putera tersebut tokoh-tokoh nasional empat serangkai tersebut dapat mengarahkan perhatian rakyat kepada kemerdekaan daripada usaha membantu usaha perang Jepang.

Sementara dalam bidang ekonomi dan sosial, seluruh kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Jepang kemudian menerapkan sistem autarki yaitu tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membangun fasilitas perang, Jepang memerlukan banyak tenaga kuli yang kemudian disebut dengan nama *romusha*. Dengan sistem ini, rakyat dipaksa bekerja tanpa diberi upah dan makanan sehingga menyebabkan rakyat berada dalam kehidupan yang sangat mengenaskan. Rakyat hidup menderita, miskin, kelaparan, dan tidak jarang terjadi kematian.<sup>19</sup> Selain *romusha*, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak tanah.<sup>20</sup>

Selain itu, dalam bidang militer Jepang melakukan mobilisasi terhadap para pemuda Indonesia untuk dididik dalam latihan militer. Hal tersebut dilalukan Jepang dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik sehingga Jepang

---

<sup>19</sup>

[http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perang\\_Dunia\\_II\\_Dan\\_Pengaruhnya\\_Terhadap\\_Indonesia\\_9.1\\_%28BAB\\_2%29](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perang_Dunia_II_Dan_Pengaruhnya_Terhadap_Indonesia_9.1_%28BAB_2%29) diakses pada tanggal 28 Desember 2010

<sup>20</sup> *Ibid.*

membentuk organisasi-organisasi semimiliter dan organisasi militer.<sup>21</sup> Organisasi semimiliter yang berhasil dibentuk oleh Jepang diantaranya adalah;

1. *Seinendan* (Barisan Pemuda), dididik dan dilatih untuk dapat menjaga pertahanan lokal jika diserang oleh tentara sekutu.
2. *Fujinkai* (Himpunan Wanita), ditujukan untuk memberikan latihan-latihan kemiliteran pada wanita minimal usia 15 tahun.
3. *Keibodon* (Barisan Pembantu Polisi), membantu tugas-tugas polisi.
4. *Suishintai* (Barisan Pelopor), dipimpin oleh Soekarno
5. *Gakukotai* (Barisan Pelajar), dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944
6. *Jibakotai* (Barisan Berani Mati).

Dan organisasi militer yang berhasil dibentuk oleh Jepang adalah *Heiho* (Pembantu Prajurit Jepang), dibentuk pada bulan April 1943. *Heiho* adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang baik dalam Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Selain diberi latihan militer, para anggota *Heiho* juga diberi kesempatan untuk mengendalikan senjata antipesawat, tank, dan artileri medan. Dan satu lagi organisasi militer bentukan Jepang adalah PETA (Pembela Tanah Air), dibentuk tanggal 3 Oktober 1944 atas usul dari Gatot Mangkupraja. Para pemuda yang tergabung dalam Peta mendapatkan latihan-latihan kemiliteran.

Dalam menghadapi penjajahan Jepang, para pejuang memiliki strategi yang tidak sama. Ada golongan golongan kooperatif yang bersedia bekerjasama dengan Jepang dengan melibatkan diri dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dan golongan lain adalah golongan nonkooperatif yang tidak mau bekerjasama dengan Jepang. Mereka kemudian membentuk organisasi yang bersifat bawah tanah. Salah satu tokoh yang membentuk organisasi bawah tanah tersebut adalah Sutan Sjahrir. Sjahrir dengan beberapa kaum pelajar di beberapa kota menentang keberadaan Jepang sebagai Negara fasis. Mereka berjuang secara sembunyi-sembunyi sehingga gerakan ini disebut gerakan bawah tanah. Perlawanan rakyat Indonesia diberbagai daerah muncul sebagai akibat dari kekejaman yang dilakukan oleh pihak Jepang yang menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.

Pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadi pengeboman dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh pihak sekutu. Kondisi Jepang mulai terpuruk dengan keberhasilan pihak sekutu menguasai beberapa pusat pertahanan Jepang. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk menuju kemerdekaan dengan membentuk PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekana Indonesia*) pada tanggal 7 Agustus 1945. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, maka Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.<sup>22</sup>

Sementara itu, di Indonesia, Sutan Sjahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 Agustus bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah kemudian segera bersiap-siap untuk memproklamkan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945,

---

<sup>22</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Nusantara\\_%281942-1945%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_%281942-1945%29) diakses pada tanggal 28 Desember 2010

Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dengan pertimbangan tersebut, Soekarno khawatir proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Mereka berusaha meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.

Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah tidak mungkin lagi terjadi maka Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Dengan semangat dan tekad yang tinggi dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia sampai pada gerbang kemerdekaan yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilakukan di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada pukul 10.00 WIB.

Namun, sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia belum mempunyai konsep yang sesuai sebagai landasan bernegara. Berbagai ideologi bermunculan untuk menentukan arah berbangsa dan bernegara. Pada saat itu, sosialis merupakan paham yang berkembang ditengah-tengah rakyat Indonesia. Banyak tokoh yang terpengaruh oleh paham tersebut dan salah satunya adalah Sutan Sjahrir. Sjahrir meyakini bahwa dengan paham sosialisme, Indonesia mampu mengubah tatanan masyarakat yang lebih baik. Namun, Sjahrir tidak kemudian menyerap paham sosialisme secara mentah-mentah akan tetapi Sjahrir berusaha menyesuaikan sosialisme dengan kondisi bangsa Indonesia yang kemudian dikenal dengan sosialisme kerakyatan. Sosialisme kerakyatan adalah sosialisme ala Indonesia. Bagi Sjahrir, sosialisme merupakan suatu cara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedewasaan manusia, yaitu bebas dari penindasan dan penghisapan serta penghinaan oleh manusia terhadap manusia.<sup>23</sup> Sjahrir melihat bahwa kondisi pada pasca kemerdekaan masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai feodalisme, fasisme, dan otoriterisme. Melihat kondisi yang demikian, maka hal yang menjadi prioritas menurut Sjahrir adalah pembinaan demokrasi.<sup>24</sup>

Sjahrir menginginkan perubahan dilakukan secara bertahap dengan membentuk partai melalui parlemen dan Negara dibutuhkan untuk menjamin fungsi keadilan. Sjahrir kemudian memperkenalkan sistem yang diterapkan di Eropa yaitu sistem cabinet parlementer. Untuk mewujudkan cita-citanya, sjahrir kemudian menjadi perdana menteri pertama Indonesia pada tanggal 14 November 1945. Selain

---

<sup>23</sup> Sutan Sjahrir. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Jakarta. Lappenas. 1982. Hal. 84

<sup>24</sup> Lihat, Rosihan Anwar. *Sutan Sjahrir Demokrasi Sejati, Pejuang Kemerdekaan 1909-1966*. Jakarta. Kompas. 2010. Hal 113

itu, Sjahrir juga ikut terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan Sjahrir dalam menciptakan Indonesia sangatlah besar. Hal ini terutama pada periode 1945-1949, periode tersebut merupakan Indonesia sedang menentukan jati diri dalam berbangsa dan bernegara yang benar-benar merdeka. Dengan berbagai tekanan yang muncul terhadap Indonesia menjadikan para pemimpin bangsa pada saat itu perlu mengambil suatu tindakan strategis. Berbagai pemikiran yang muncul memperlihatkan secara nyata usaha-usaha untuk menciptakan kedaulatan bangsa. Tak heran kemudian, pada periode tersebut banyak tokoh yang menawarkan suatu sistem bernegara yang akan diterapkan di Indonesia diantaranya adalah sistem demokrasi parlemen dan demokrasi terpimpin.

Dalam perjalanannya, sistem demokrasi melalui jalan parlementer yang mengakui adanya partai-partai politik yang muncul lebih dari satu partai mendapat pertentangan dari Soekarno yang menginginkan hanya ada satu partai di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, Soekarno menginginkan terciptanya sistem demokrasi terpimpin sebagai landasar bernegara.

Melihat fenomena kebangsaan hari ini, dapat dikatakan bahwa sebenarnya rakyat Indonesia sedang berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat sulit bagi masa depan bangsa. Perang imperialism sudah sangat mempercepat dan memperhebat proses perubahan kapitalisme monopoli menjadi monopoli capitalism Negara-negara. Penindasan yang mengerikan atas nama Negara yang semakin lama semakin berpadu dengan perserikatan-perserikatan kapitalis yang maha besar menjadi momok yang selalu menghantui setiap sendi kehidupan masyarakat. Ketidakadilan

yang terjadi selama ini menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem menimbulkan kemiskinan, penyakit dan kebodohan, separatism dan konflik. Selain itu, budaya feodalisme klasik yang hingga kini masih menidurkan banyak rakyat Indonesia dalam kebodohan dan keterbelakangan mengakibatkan hancurnya mentalitas bangsa yang kemudian menciptakan mentalitas komperador. Ditambah lagi, penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk penjajahan yang mengakibatkan terasingnya rakyat Indonesia dari bangsanya sendiri. Asset-aset Negara yang seharusnya menjadi milik rakyat sepenuhnya dikuasai oleh bangsa asing. Kondisi Indonesia kini seolah tidak lagi mempunyai harga diri dimata internasional.

Melihat fenomena-fenomena tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia belum benar-benar mampu menjadikan rakyatnya sejahtera dan bangsa Indonesia belum benar-benar keluar dari belenggu yang menjajah. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Sutan Sjahrir kemudian menawarkan sebuah gagasan pikirannya tentang sosialisme kerakyatan. Gagasan yang ditawarkan oleh Sutan Sjahrir dapat dijadikan rujukan dalam melihat kondisi kebangsaan hari ini yang masih diselimuti oleh ketimpangan dan ketertindasan. Pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme kerakyatan tentunya sebuah pemikiran yang universal, mengikuti zaman dan layak dijadikan sebagai referensi untuk mencapai kesejahteraan dan kemerdekaan Indonesia.

Dalam melihat kondisi bangsa hari ini, letak relevansi dari pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme kerakyatan adalah meski bangsa Indonesia telah mendapatkan pengakuan kemerdekaan dimata internasional, namun sampai saat ini

#### D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan deskripsi tentang Sosialisme Kerakyatan untuk menuju negara kesejahteraan menurut pemikiran Sutan Sjahrir. dan secara praktis, manfaat penelitian ini adalah menambah khasanah pengetahuan politik dalam negeri khususnya pemikiran politik Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Kerakyatan.

#### E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi. Teori mempunyai peranan yang cukup penting dalam suatu penelitian dikarenakan dengan unsur-unsur inilah penelitian akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial atau gejala-gejala alami yang menjadi pusat perhatian. Menurut Masri Singarimbun, teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu hubungan antar konsep. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan variable lainnya, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.<sup>25</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan menjelaskan dengan menggunakan teori pemikiran politik, ideology politik dan konsep sosialisme. Melalui teori dan konsep tersebut diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan suatu pemahaman yang memadai untuk memudahkan pengkajian pemikiran politik Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Kerakyatan.

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES. 1989. Hal. 37

## 1. Pemikiran Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.<sup>26</sup> Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dan kegiatan politik, b) cara-cara pencapaian tujuan, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Menurut Thomas P. Jenkis dalam *The Study Of Political Theory* dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.<sup>28</sup>

- 1) Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (*norms for political behavior*). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (*value*) maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuational* (mengandung

---

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2006. Hal. 30

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*,

nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideology, dan sebagainya.<sup>29</sup>

a) Filsafat Politik (*Political Philosophy*)

Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakekat dari alam semesta (*universe*) dengan sifat dan hakekat dari kehidupan politik dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan politik yang menyangkut alam semesta seperti *metaphysika* dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya menurut filsuf Yunani plato, keadilan merupakan hakekat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai “kehidupan yang lebih baik” (*good life*) yang dicita-citakan olehnya.

b) Teori Politik Sistematis (*Systematic Political Theory*)

Teori-teori ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metaphisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Misalnya, dalam abad ke-19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 30-31

kekuasaan negara dan mengenai sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Bahasan-bahasan ini didasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam itu sendiri.

c) Ideologi Politik (*Political Ideology*)

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idea, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu "weltanschauung", yang dimiliki seorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar-dasar ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata-tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran (*prescription*) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Ideologi berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung-renung mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (*action-oriented*).

Ideologi yang berkembang luas mau tidak mau dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat dimana dia berada, dan sering harus mengadakan kompromi dan perubahan-perubahan yang cukup luas. Contoh dari beberapa ideologi atau doktrin politik ialah misalnya demokrasi, Marxisme-Leninisme, liberalisme, fasisme, dan

sebagainya, diantara mana Marxisme-Leninisme merupakan ideologi yang sifat doktriner dan sifat militannya paling menonjol.<sup>30</sup>

- 2) Teori-teori yang menggambarkan dan membahas penomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai. Teori ini dapat dinamakan *non-valuational* (suatu istilah yang dewasa ini sering dipakai ialah "*value free*" (bebas nilai)). Ia biasanya bersifat diskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Pemikiran adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan kongklusi-kongklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran dalam mendasarkan pandangannya, pokok-pokok pikirannya dan kaidah-kaidahnya akan bersumber pada pandangan umum dan sistem kepercayaan. Jadi pemikiran politik adalah jenis pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat politik.<sup>31</sup>

Pemikiran politik dapat didefinisikan dengan melihat masalah-masalah dan topik-topiknya, yaitu jenis pikiran yang bertujuan memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat politik. Sementara yang disebut dengan masyarakat politik itu sendiri adalah masyarakat yang mempunyai lembaga kekuasaan khusus yang dapat diadopsi, yang mengatur

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal. 31-32

<sup>31</sup> Tijani Abd Kadar Hamid. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*. Gema Insani Press. Jakarta. Hal. VII

masyarakat. Kemudian hukum dan undang-undang itu diaplikasikan kepada masyarakat dan memaksa mereka untuk mematuhi. Lalu undang-undang itu dipatuhi secara umum oleh masyarakat dan diikuti mempunyai suatu kekuatan dengan suka rela atau secara terpaksa. Juga diakui sebagai kekuatan tertinggi dalam masyarakat itu dan yang dapat memberikan material.

Sedangkan politik didefinisikan sebagai usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Namun, secara definisi modern politik mencakup pengaturan negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata memerintah dan mengatur saat itu berarti dalam seluruh masyarakat adalah kekuasaan terorganisir serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan.

## 2. Ideologi Politik

Istilah ideologi pertama kali digunakan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1838), de Tracy secara tegas menyebut ideologi dan menggarapnya secara sistematis. Tetapi perenungan yang lebih dalam dengan beberapa persoalan yang dimunculkan oleh pengertian ideologi telah dimulai jauh lebih awal.<sup>32</sup> Marchieveli (1469-1520), merupakan pengarang pertama yang membicarakan permasalahan secara langsung yang berkaitan dengan fenomena ideologi. Dalam studinya, Marchieveli menggunakan metode komparatif dalam pendekatan studi politik dengan mengandalkan sejarah sebagai data empirisnya. Dia lebih menekankan pada suatu

---

<sup>32</sup> Larrain Jorge. *Konsep Ideologi, Konsep Ideologi*. Yogyakarta. LPKSM. Hal.

penemuan hukum universal suatu tindakan yang menjadi dasar keberhasilannya. Dengan menawarkan analisis empiris yang rasional tentang Negara dan politik modern, ia dipandang sebagai kunci pembuka dari ilmu politik kontemporer.<sup>33</sup> Selain itu, Marchievelli mencoba menghubungkan antara agama dengan kekuasaan dan dominasi. Dengan jelas dia mengantisipasi tema tentang konsep ideologi seperti misalnya mengenai fungsi-fungsi sosial dari pemikiran keagamaan. Sumbangan lain Marchievelli kepada praktek politik dilengkapi oleh berbagai perkembangan dalam ilmu pengetahuan, dengan disintegrasi masyarakat abad pertengahan. Pendekatan ilmiah yang baru dari pengetahuan alam menerima dorongan dan mulai mengganti skolastik.<sup>34</sup>

Perkembangan pengetahuan alam yang diteliti dan terbatas pada hakekatnya bukannya karena orang-orang tidak dapat mengetahui dunia, akan tetapi karena rintangan buatan manusia yang telah mencegahnya. Inilah yang menyebabkan faktor terganggunya lahirnya pengetahuan alam. Dengan kata lain, lahirnya ilmu pengetahuan perlu dibarengi oleh kritik terhadap metode pengamatan terlebih dahulu. Keraguan terhadap metodologi ilmu pengetahuan, serta mulai timbulnya sebuah penghancuran terhadap penghalang yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri menjadi alasan Larrain Bacon dalam menerapkan metode induksi dalam pengetahuan seperti yang dikatakan oleh Francis Bacon dalam karyanya *Novum Organon* yang observasional mengganti metodologi deduktif pada logika formal dalam mendekati realitas sebagai subjek observasi yang tertuang dalam *Organon* yang observasional

---

<sup>33</sup> Schamandt. J. Henry. *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005. Hal. 252

<sup>34</sup> *Ibid.*

mengganti metodologi deduktif pada logika formal dalam mendekati realitas sebagai subjek observasi yang tertuang dalam *Oragon* karya Aristoteles. Dalam karya tersebut Aristoteles mengemukakan konsep idola yang merupakan gambaran corak berpikir irasional dalam masyarakat yang menutup nalar perkembangan ilmu.

Dalam gejolak revolusi Prancis, ideologi sebagai kajian sistematis keilmuan mulai muncul dan istilah ideologi itu pertama kali ada. Konsep ini diciptakan pada tahun 1979 oleh Antoine Destutt de Tracy yaitu seorang anggota kelompok *Institute de France* yang baru berdiri dan khusus untuk menyebarkan gagasan-gagasan penverahan.<sup>35</sup> Dalam karyanya *Element d' Ideologie* yang ditulis antara tahun 1801 dan tahun 1815, de Tracy membuat gagasan baru tentang ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada pikiran yang kemudian disebut idea-logy. Ilmu tentang ide-ide tersebut harus mengesampingkan prasangka-prasangka metafisik dan agama karena idea-logy tersebut merupakan sebuah pijakan baru yang akan mengembangkan wilayah saint sehingga result ilmiah harus dilahirkan dari prasangka-prasangka ketidakpastian yang merupakan produk dari ide-ide palsu dengan menolak bahwa pikiran bukan merupakan sebuah ide bawaan yang sudah ada tanpa benturan pada dunia fisik.<sup>36</sup>

Pembentukan ide-ide manusia lahir dari sensasi fisik yang terkontaminasi sensasi masa lalu yang konsepsionisnya adalah bentuk imitasi masa lampau. Proses berpikir tersebut bermaksud juga dalam bentuk kemampuan menilai sebuah sensasi yang mempunyai hubungan pada berbagai persepsi. Bagi de Tracy, ideologi adalah bagian dari zoology (ilmu hewan) dan dalam intelek manusia sebagai sebuah hal yang

<sup>35</sup> Larrain Jorge. *Konsep Ideologi, Konsep Ideologi*. Yogyakarta. LPKSM. Hal. 7

<sup>36</sup> Thompson B John. *Kritik Ideologi Global*. Yogyakarta. IRCidSoD. 2004. Hal. 51

penting dan pantas untuk diselidiki secara mendalam. Karena terbentuknya masyarakat berpendidikan yang juga berdasarkan tata tertib moral, kesamaan atas asal mula kebutuhan serta hasrat manusia yang universal dapat dikemukakan pada saat proses penyelidikan terhadap pola pikir individu. Kesamaan atas kebutuhan inilah yang nantinya akan menjadi landasan terbentuknya struktur hukum sebagai landasan dalam mewujudkan tertib sosial. Landasan ilmiah yang sejajar dengan pemenuhan kebutuhan yang bersesuaian merupakan gambaran bahwa alam dan manusia adalah sebuah esensial yang berdampingan dengan penjabaran yang rasional atas keberadaan asal mula pikiran dan inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah ideologi.

August Comte merupakan salah satu tokoh yang mencoba melepas kajian ilmu sosial dengan metode spekulatif (imajinatif) dengan menggunakan alur sistematika fisika sebagai metode analisis yang biasanya dikenal sebagai metode "fisika sosial". Bagi Comte, fisika sosial akan memungkinkan terjadinya rekonsiliasi antara ketertiban dan kemajuan dengan mengalihkan solusi mengenai persoalan-persoalan sosial kepada segelintir cendekiawan elit melalui pendidikan yang tepat. Dengan cara ini, revolusi akan diakhiri oleh instalasi suatu kekuatan spiritual yang baru sehingga dasar teknokratis dan fungsi sosial menjadi jelas. Pendidikan manusia menurut Comte berada pada tiga tahap yaitu pada tahap pertama adalah teologi. Ditahap ini, manusia memohon bantuan ghaib (supernatural) dan segala kejadian di dunia dianggap sebagai kehendak kekuatan ghaib itu. Manusia menyerah pada semangat benda, pohon dan binatang dan kemudian memuja Tuhan yang diyakini bertanggungjawab atas berbagai fase kehidupan. Tahap kedua adalah tahap metafisik, yaitu munculnya segala sesuatu setelah manusia menggantikan Tuhan dengan zat atau

penyebab yang abstrak. Prinsip-prinsip yang fundamental tentang realitas dipahami dengan nalar. Tahap ketiga adalah tahap positif, pada tahap ini pencapaian terjadi setelah menyerahkan hukum yang berdasarkan pada hukum dengan bukti empiric, pengamatan, perbandingan dan eksperimen inilah abad ilmu pengetahuan dan industrialism segera berkembang pesat. Pertumbuhan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan kualitatif segera setelah kualitas tertinggi pengetahuan positif tercapai. Jadi menurut Comte, sejarah manusia adalah sejarah perubahan pemikiran dan masyarakat yang saling menyesuaikan dan mencerminkan satu sama lain.<sup>37</sup>

Selain di Prancis, landasan ideologi juga mengakar di Jerman. Wacana ideologi di Jerman dikembangkan oleh kaum romantik<sup>38</sup> yang dipicu oleh revolusi industri. Revolusi ini menjadi embrio rasionalistas bagi kaum romantic dalam pembentukan analisis. Kaum romantik memandang perubahan yang ada dalam realitas diciptakan oleh individu maupun kolektif ketika menyikapi gejolak-gejolak yang melingkupinya. Kemunculan pemikiran ini mempengaruhi para pemikir di Jerman yang salah satunya adalah Hegel. Hegel mencoba mengungkapkan pemikiran ini lebih analitik sistemis dalam menyikapi perkembangan realitas. Konsep totalitas yang digunakan dalam jangkauan luas semua ilmu, semua seni dan pengetahuan, agama, pemikiran politik, sejarah dimanapun mereka disatukan dalam pemikiran absolute atau jiwa absolute atau Tuhan merupakan realitas utama. Jadi, realitas merupakan suatu konsep totalitas rasional yang luas dan kompleks. Totalitas ini merupakan pemikiran absolute dan jiwa absolut. Keabsolutan dalam totalitas

---

<sup>37</sup> Sztompka Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Pranada. 2004. Hal. 118

<sup>38</sup> Kaum romantik Jerman adalah salah satu pergerakan revolusioner dalam bidang sastra, filsafat dan seni visual yang lebih menonjol dalam bidang politik.

pemikiran merupakan gambaran dari jiwa yang absolut yang membentuk kenyataan yang rasional. Dan keabsolutan tersebut hanya dimiliki oleh jiwa yang absolut yang berbeda seperti yang ada pada manusia karena pada dasarnya pemikiran manusia mempunyai keterbatasan. Pemikiran absolut mempunyai sifat objektif, sedangkan pemikiran manusia terbatas pada subjektivismenya.

Seperti yang terdapat dalam karya de Tracy tentang sebuah sains yang bermanfaat bagi ide-ide, maka Marx lebih memilih pada sisi kritis yang dipopulerkan oleh cemoohan Napoleon yaitu metafisik yang membingungkan. Pelestarian terhadap sisi kritis dan perbedaan alasan untuk menjustifikasi tentang ideologi tersebut membuat tradisi marxis menjadi menarik. Menurut Marx, makna peyoratif konsep ideologi mencakup dua unsure utama. Pertama, ideologi berhubungan dengan idealism sebagai sebuah sudut pandang filosofis yang tidak bias dipertentangkan dengan materialisme. Kedua, ideologi berhubungan dengan ketidaksetaraan distribusi sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Penyelidikan terhadap dunia sosial yang merupakan analisis Marx tentang ideologi bukan hanya dalam wilayah agama dan politik saja sehingga konsepsi ideologi yang terbangun dalam hal ini adalah sebuah ilusi yang terjangkit dalam kuasa agama melalui legitimasi politik. Maka dalam penjelasannya, ideologi harus dihubungkan dengan praksis material. Dalam *The German Ideology*, Marx mencoba menjelaskan realitas material bukanlah hasil dari pembentukan kesadaran yang didasarkan pada alam ide tapi realitas sosial merupakan konstruk yang terbangun dari alam materialnya yang nanti akan mendistorsi alam kesadaran. Keberadaan manusia dalam wujud materailnya

merupakan banguna kesadaran maka kesadaran itu terbentuk dalam kerangka kehidupan yang nyata.

Pemenuhan kebutuhan primer merupakan aspek utama dalam proses pengkajian terhadap realitas kesejarahan. Pemenuhan kebutuhan tersebut adalah bentuk keberadaan manusia sehingga manusia dengan keberadaannya lahir dari penciptaan kebutuhan dengan cara melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut melingkupi pengelolaan alam atas dasar kerja yang dilakukan oleh manusia sehingga menjadi sebuah materil produksi yang mempunyai nilai pakai. Menurut Marx, kerja merupakan titik tolak awal manusia untuk mengungkapkan keberadaannya yang pada akhirnya keberadaan tersebut menciptakan dunia materilnya baik dalam penciptaan ilmu sosial sekalipun. Oleh karena itu, Marx mengatakan bahwa ideologi harus dijelaskan dari praktek material. Akan tetapi, bukan semua ide adalah ideologi dan Marx tidak hanya sekedar menghasilkan sains tentang idenya de Tracy dalam versi yang lebih dinamis. Yang mengubah ide menjadi ideologi adalah hubungan ide tersebut dengan corak hubungan sosial serta ekonomi yang bersifat konfliktual yang mencirikan proses kerja.

### **3. Sosialisme**

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena, dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai acuan cadangan.

Sosialisme pada umumnya digunakan sebagai sebuah ideology, seperangkat alat kepercayaan komprehensif atau idealisasi tentang sebuah masyarakat dan Negara

sesuai dengan cita-cita para penggagas bagi gerakannya. Kaum sosialis mendasarkan idenya pada kalim-klaim perjuangan terhadap nilai persamaan, keadilan social, kerjasama, kemajuan, kebebasan individu, nihilnya kepemilikan privat, dan control Negara atas barang-barang produksi.<sup>39</sup> Sosialisme memiliki ideology dimana Negara mengontrol produksi dan distribusi. Model gerakan yang diterapkan untuk mencapai transformasi social tersebut diperjuangkan melalui jalur konstitusi bahkan bisa dengan cara-cara revolusioner. Inti dari paham sosialisme adalah suatu usaha untuk mengatur masyarakat secara kolektif. Artinya semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak demi terciptanya suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat manusia yang bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan, tetapi manusia juga harus saling tolong-menolong.

Mengenai asal-usulnya, term sosialis pertama kali dipakai pada 1827 dalam *Cooperative Magazine* sebagai gambaran umum doktrin kooperatif milik Robert Owen ( 1771-1858 ), dan kemudian sebagai “ Sosialisme “ pada 1832 dalam *La Globe*, jurnal milik pengikut tokoh sosialis Comte de Saint-Simon ( 1760-1825 ).<sup>40</sup>

Secara historis sebenarnya ajaran sosialisme telah diajarkan sejak zaman Plato, ajaran nabi-nabi Yahudi, dan kitab Perjanjian Baru. Dengan demikian dapat ditarik sebuah asumsi bahwa sosialisme dari awal mempunyai watak religius. Engels seorang ilmuwan Jerman dalam karyanya mengenai perkembangan sosialisme dari utopia menjadi ilmu, mengatakan bahwa sosialisme pada hakekatnya adalah produk langsung dari pengakuan atas antagonism-antagonisme kelas yang ada dalam masyarakat, antara kaum pemilik modal dengan kaum bukan pemilik, antara kaum kapitalis dengan kaum buruh upahan, di pihak lain , pengakuan atas anarki yang

---

<sup>39</sup> Eko Supriyadi. *Sosialisme Islam..Op.cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hal 60

muncul dalam proses produksi.<sup>41</sup> Dalam masa itu sosialisme menemui masa baru dimana saat itu muncul tokoh sosialis seperti Karl Marx dan sahabatnya Engels. Sejak saat itu pula jika kita berbicara masalah sosialisme maka tidak bisa dilepaskan dari sosok Karl Marx.

Akan tetapi banyak tokoh sosialis lainnya yang juga mencetuskan gagasannya tentang hal tersebut jauh sebelum Karl Marx muncul. Para tokoh pemikir sosialis tersebut diantaranya adalah de Saint Simon, Marie Charles Fourier, dan Robert Owen. Dari beberapa ilmuwan tersebut tentunya mempunyai pemikiran yang tidak sama persis, akan tetapi juga tidak berbeda secara mendasar.

**Tabel 1**  
**Pemikiran Sosialisme**

No	Tokoh	Pemikiran Sosialis
1.	De Saint Simon (1760-1825)	Pengaturan dunia seharusnya diserahkan kepada tangan orang yang berilmu pengetahuan dan beberapa golongan manusia demi kepentingan dan perbaikan nasib si miskin yang banyak. <sup>42</sup>
2.	Marie Charles Fourier (1772-1837)	Pengaturan masyarakat dengan mengusahakan pekerjaan yang terbuka luas sehingga masyarakat merasa puas dimana ia dapat mengganti bidang pekerjaannya tanpa mengurangi hasil produksi. <sup>43</sup>
3.	Robert Owen (1771-1858)	Kondisi masyarakat yang benar-benar menjalankan persamaan tanpa hirarki dalam bentuk apapun kecuali perbedaan umur. <sup>44</sup>
4.	Karl Marx (1818-1883)	Kondisi masyarakat yang tidak ada pertentangan kelas dan kekuasaan berada ditangan diktatur proletariat. Kondisi dimana tidak ada satu kelas yang menindas kelas lain. <sup>45</sup>

Dari pemikiran yang dikemukakan oleh beberapa pemikir diatas, mereka mempunyai tujuan tertentu yang berangkat dari realitas yang mereka hadapi dan

<sup>41</sup>Frederick Engels, *Perkembangan Sosialisme dari Utopia Menjadi Ilmu*, [www.marxist.org/Indonesia/index.html](http://www.marxist.org/Indonesia/index.html) diakses pada tanggal 04 September 2010

<sup>42</sup> Deliar Noer. *Pemikiran Politik Barat*. Yogyakarta. Mizan. Hal 189-190

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

mereka merasa tidak terima dengan kondisi masyarakat yang menderita. Gagasan yang dikemukakan oleh de Saint Simon tentang masyarakat sosialis mempunyai tujuan menghasilkan kesempatan yang seluas mungkin kepada seluruh anggota masyarakat bagi perkembangan fakultas diri mereka.<sup>46</sup> Kemudian sama dengan Robert Owen, Fourier mempunyai tujuan membentuk suatu masyarakat-masyarakat kecil yang tidak mengenal penderitaan dan terbentuk masyarakat tanpa hierarki kelas apapun.<sup>47</sup> Kemudian masyarakat sosialis yang dimaksud oleh Karl Marx merujuk kepada sebuah masyarakat tanpa kelas. Pada dasarnya pemikiran tentang masyarakat sosialis yang digagas oleh beberapa ilmuwan mempunyai alur yang hampir sama. Mereka menginginkan masyarakat tanpa kelas dan tanpa penindasan oleh suatu kelas atas kelas lainnya.

Dalam perkembangan berikutnya, sosialisme versi Karl Marx dipopulerkan dengan term Marxisme. Istilah Marxisme sendiri adalah sebutan bagi pembaku ajaran resmi Karl Marx. Dengan istilah barunya, Marxisme menjadi gerakan yang cukup populer yang kemudian terekspansi ke berbagai Negara serta mempengaruhi pemikiran berbagai kelas sosial.

Dalam teorinya Karl Marx mempunyai bentuk klasifikasi masyarakat yang ada keterkaitan antara hubungan produksi, tenaga produktif dan cara produksi. Menurut Karl Marx ketiga hubungan tersebut kemudian menjadikan sebuah tatanan baru dalam pola kehidupan masyarakat itu sendiri yang bisa menimbulkan teralienasinya salah satu masyarakat tertentu.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Dalam suatu aktivitas produksi menurut Karl Marx, guna memenuhi kebutuhannya manusia berhubungan dengan manusia lain. Karena proses produksi merupakan hasil saling hubungan antar manusia, maka sifat dari produksi juga selalu bersifat sosial. Saling hubungan antar manusia suatu proses produksi ini disebut sebagai hubungan social produksi. Dari kegiatan produksi ini kemudian muncul kegiatan berikutnya yaitu distribusi dan pertukaran barang. Hubungan social produksi dalam sebuah masyarakat bisa berbentuk kerja sama atau bersifat penghisapan. Hal ini tergantung siapakah yang memiliki atau menguasai seluruh alat-alat produksi (alat-alat kerja dan obyek kerja).

Kelompok pemikir dari pihak sosialis percaya bahwa nilai-nilai baru yang ada di masyarakat akan berkembang dengan sangat baik ketika terjadi pemerataan ekonomi setiap manusia yang hidup di suatu daerah dengan tidak adanya kelas-kelas di masyarakat.<sup>48</sup> Dalam kamus sosialis percaya bahwa masyarakat di takdirkan berevolusi dari tata yang rendah ke tata yang lebih tinggi, sehingga sistem yang kurang baik akan digantikan oleh sistem yang lebih baik. Sosialis percaya alat produksi dimiliki secara bersama, sehingga tidak terjadi penghisapan antara kelompok masyarakat yang ada kepada kelompok masyarakat lain. Apa akibat dari alat produksi tidak di miliki secara bersama? Akibat yang paling fatal menurut sosialis adalah para tuan tanah akan menindas para pekerja, para tuan tanah akan menindas dan menghisap kaum buruh tani, dan para pemilik modal akan menghisap kaum buruh.<sup>49</sup> Hal yang paling menarik dalam kontes perjuangan sosialis

---

<sup>48</sup> <http://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/Soviet/Pengantar.htm>..diakses di akses pada tanggal 22 November 2010

<sup>49</sup> *Ibid.*

ini adalah eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok pemilik modal terhadap buruh akan memungkinkan terjadinya akumulasi modal sementara hasil yang diterima oleh buruh adalah terjadinya penyengsaraan dan pemiskinan di kalangan buruh.

Hubungan social produksi inilah yang kemudian membentuk suatu cara produksi dalam suatu masyarakat. Dalam mengklasifikasikan bentuk perubahan masyarakat Karl Marx menggambarkan sebagai misalnya cara produksi komunal primitif- perbudakan-feodalisme-kapitalisme-sosialisme. Perubahan yang terjadi dari suatu cara proses produksi tertentu ke cara produksi yang lain terjadi akibat berkembangnya tenaga produktif dalam suatu masyarakat yang akhirnya mendorong hubungan produksi lama tidak dapat dipertahankan lagi dan menuntut adanya hubungan produksi baru. Inilah hukum dasar sejarah masyarakat dan merupakan sumber utama dari semua proses perubahan social yang ada.

Dari siklus hukum dasar masyarakat tersebut sosialisme merupakan urutan terakhir dalam tatanan masyarakat sebelum masyarakat komunis. Dalam masyarakat sosialis ditemukan sebuah idealitas tatanan masyarakat dimana terjadi kolektifitas kerja dan seluruh aspek kehidupannya. Konsep sosialisme pada umumnya digagas untuk menghilangkan alienasi yang terjadi dalam sebuah proses yang memarginalkan sebuah kelompok tertentu oleh kelompok lainnya. Jika dalam istilah Karl Marx harus adanya keseimbangan antara pemilik modal dan kaum pekerja. Karena menurut Karl Marx yang terjadi selama ini antara si pemilik modal dan pekerja hanyalah sebuah proses produksi yang pada umumnya menyebabkan ketertindasan pada pihak pekerja.

Keyakinan bahwa konsentrasi kekayaan dan persaingan yang tidak terkontrol niscaya akan mengakibatkan kemiskinan dan krisis yang terus bertambah, bahwa

system ini harus diganti dengan system lain dimana organisasi produksi dan pertukaran hasilnya akan menghasilkan pembagian kekayaan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesamaan : entah bahwa pendapatan semua orang persis sama, entah suatu pembagian pendapatan menurut prinsip kepada siapa menurut pekerjaannya atau dalam perspektif lebih luas kepada siapa menurut kebutuhannya.<sup>50</sup>

Begitu juga dengan seorang tokoh sosialis Indonesia yaitu Sutan Sjahrir yang juga memiliki gagasan sosialisme yang digambarkan melalui proses perjuangannya dalam melawan kolonialisme penjajahan asing. Hal itu terbukti dengan sikap penolakannya terhadap kedatangan penjajahan asing yang pada saat itu datang menjajah bangsa asing di Indonesia ditentang keras oleh Sutan Sjahrir karena sepemahaman dengan konsepsi Karl Marx tentang penghisapan yang dilakukan oleh para pemilik modal terhadap para pekerja hanya menimbulkan teralienasinya sebuah masyarakat oleh satu masyarakat yang lain yang memiliki alat produksi. Akhirnya ketidak seimbangan dalam pembagian hasil akan menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi kepada masyarakat pekerja.

#### **4. Kedaulatan Rakyat**

Menurut kamus politik, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi dalam Negara ada dalam tangan rakyat seluruhnya. Rakyat memberi legalitas dan kekuasaan pada pemerintah (negara) dan melindungi diri terhadap penyalahgunaan kekuasaan ini dengan menyatakan hak-hak asasi para warga Negara, member kekuasaan pada lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip kedaulatan rakyat

---

<sup>50</sup> Franz Magnis Suseno. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999. Hal 19

dikembangkan dalam sejarah, karena teori-teori lain tentang sumber kedaulatan tidak memuaskan dan sering disalahgunakan. Para penganjur kedaulatan rakyat adalah: Marsilius dari Padua (abad ke-14), J. Lock (1704), dan J.J. Rouseau (1712-1778).<sup>51</sup>

Menurut kamus politik, kedaulatan rakyat sama artinya dengan kata demokrasi.<sup>52</sup> Istilah demokrasi berasal dari dua kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat untuk rakyat”.<sup>53</sup> Demokrasi bukanlah ideologi politik yang digunakan demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat (seperti dalam ide liberalism klasik), atau untuk kepentingan partai (seperti dalam ideologi komunis) tetapi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang diatur secara tertib oleh pemerintah yang berbentuk atas suara mayoritas penduduk. Bentuk pemerintahan demokrasi seperti itu biasanya dilaksanakan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan berkala yang bebas yang melalui pemilihan itu ada persaingan terbuka untuk meraih kekuasaan politik. Para pemikir teori demokrasi terkemuka dapat disebutkan misalnya: Plato, James Harrington, John Lock, J.J. Rouseau, Thomas Jefferson, Thomas Paine, Jeremy Bentham, James Mill, John Sturt Mill, Alexis De Tocqueville, L.T. Hobhouse, John Dewey, Joseph Schumpeter.<sup>54</sup>

Sementara, dalam kamus ideologi politik modern menyatakan bahwa kedaulatan rakyat akan eksis jika rakyat berkuasa, bila individu memiliki kesamaan hak berpartisipasi dalam proses politik dan bila satu-satunya tujuan pemerintah adalah menjamin kepentingan seluruh rakyat dan bukan orang-orang dari lapisan atau kelompok kepentingan tertentu. Ini merupakan posisi teoritis. Arti penting praksisnya

---

<sup>51</sup> B.N. Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 2005. Hal. 265

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hal. 115

<sup>54</sup> *Ibid.*

adalah bahwa konsep ini mewakili suatu tujuan ketika rezim-rezim politik yang mengaku menghargai kedaulatan rakyat harus berusaha mencapainya. Dalam pengertian praksis, kedaulatan harus dinyatakan dengan tegas melalui pranata-pranata yang tidak mesti sempurna tetapi setidaknya memungkinkan rakyat memilih wakil-wakil baik secara langsung maupun tidak langsung memilih suatu pemerintahan. Pemerintahan adalah sumber legitimasi politiknya. Susunan-susunan konstitusional sangat beragam, tetapi fungsi wakil-wakil terpilih adalah memprakarsai kebijakan dan melakukan kontrol yang terus menerus terhadap pemerintah.<sup>55</sup>

#### **F. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atas batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

##### **1. Pemikiran Politik**

Pemikiran politik adalah jenis pikiran yang bertujuan memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat politik.

##### **2. Ideologi Politik**

Ideologi politik adalah kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang sebagai dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapi dan yang menentukan tingkah laku politiknya

---

<sup>55</sup> Michael A. Riff. *Kamus Ideologi Politik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1995. Hal. 107

### 3. Sosialisme

Sosialisme adalah sebuah ideologi, seperangkat kepercayaan komprehensif atau idealisasi tentang sebuah masyarakat dan negara dengan cita-cita terakomodasinya seluruh kepentingan dalam masyarakat dan bernegara.

### 4. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah suatu tata cara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dalam sebuah Negara yang berdasarkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sepenuhnya.

## **G. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembutian hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Selain itu, batasan masalah dalam sebuah penelitian digunakan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik. Dengan adanya penegasan tentang batasan-batasan penelitian, maka hal tersebut menjadi panduan dalam melakukan penelitian dan mencegah timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi kajian penelitian pada pemikiran politik Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Kerakyatan untuk mencapai Negara Kesejahteraan. Untuk mendapatkan penelitian yang objektif maka penulis juga tidak melupakan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran politik tersebut.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari segala peraturan yang terdapat dalam penelitian. Bila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi kita dalam mengadakan penelitian. Ada beberapa bagian yang tak terpisahkan dari metode penelitian yang penulis anggap signifikan untuk disampaikan dalam penelitian ini. Bagian-bagian tersebut adalah;

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu system, suatu pemikiran atau kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>56</sup>

### 2. Unit Analisis

Unit analisa adalah suatu data terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok permasalahan dalam penelitian. Unit analisa data berisikan penegasan tentang kesatuan yang menjadi obyek dan subyek penelitian. Dalam kegiatan penyusunan unit analisa data ini unit analisisnya adalah pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisa adalah pemikiran politik Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Kerakyatan.

---

<sup>56</sup> Moh. Nazir. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998. Hal. 63

### 3. Jenis Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang diperoleh dari unit analisa yang menjadikan sebagian sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan adalah data skunder karena dalam pengumpulan informasi tidak diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti. Namun, data-data tersebut diperoleh dari arsip, buku, majalah, internet, media massa, serta dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi. Adapun cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara membaca buku-buku dan semua sumber yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis.

### 5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisis data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan atas pandangan, pendapat dan analisis data.<sup>57</sup> Analisis data merupakan proses pengorganisasi dan pengurutan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Langkah-langkahnya diawali dengan membaca dan penelaahan terhadap berbagai sumber data yang terkait dengan data skunder yang berkaitan dengan pemikiran politik Sutan

---

<sup>57</sup> Masri Singarumpun & Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. LP3S. Jakarta. 1989. Hal. 21

Sjahir. Selanjutnya mengadakan reduksi data untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari isu-isu penting dalam pertanyaan, memfokuskan pengumpulan data, sampel dan metode sampai kesimpulan dengan berupa abstraksi.

Tahap berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan dalam tema-tema yang lebih spesifik dengan keabsahan data yang terjaga. Terakhir adalah melakukan penafsiran atau interpretasi atas teks sebagai bentuk analisa sampai pada penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian.